

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TIDAK
DILAKSANAKANNYA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI
SYARAT PENGUSAHA MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN**

(Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FERNANDA KHARISMA EDITYA

NIM. 135010109111008



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2018

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TIDAK
DILAKSANAKANNYA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI
SYARAT PENGUSAHA MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN**

(Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)

JURNAL

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

FERNANDA KHARISMA EDITYA

NIM. 135010109111008



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TIDAK DILAKSANAKANNYA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI SYARAT PENGUSAHA MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MALANG)”**.

Pada penyusunan Skripsi ini tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan juga berkat bimbingan dan dorongan dari pihak-pihak yang telah membantu, baik secara materi maupun non materi. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung kepada yang terhormat:

1. Bapak Lutfi Effendi S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Agus Yulianto S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ayahanda Yohanes Edi Winardi dan Ibunda tercinta Ribka Erni Irawati yang telah memberikan doa, nasehat, kasih sayang dan kesabarannya dalam membesarkan dan mendidik penulis.
4. Reza Yonathan Editya dan Aurellsya Jessica Putri Editya sebagai adik dan yang selalu jadi penyemangat.
5. Andriana Agastyaningrum S.Kom sebagai calon istri yang selalu mendukung, membantu, memberikan semangat, dan meluangkan waktu serta nasehatnya setiap saat.
6. Teman – teman Fakultas Hukum / SAP angkatan 2013 yang telah memberikan masukan dan inspirasi kepada penulis selama menempuh studi dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak, sekali lagi saya ucapkan terimakasih.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai makna regenerasi bangsa untuk mencapai suatu keberhasilan khususnya untuk penulis sendiri.

Malang, 22 Februari 2018

Penulis

Fernanda Kharisma Editya

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TIDAK DILAKSANAKANNYA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI SYARAT PENGUSAHA UNTUK MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MALANG)**

Identitas Penulis :

- a. Nama** : **Fernanda Kharisma Editya**
- b. Nim** : **135010109111008**
- c. Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**
- d. Jangka waktu** : **1,5 Tahun**

Disetujui pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 196008101986011002

Agus Yulianto, S.H., M.H
NIK. 195907171986011001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 196008101986011002

RINGKASAN

Fernanda Kharisma, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2017, PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TIDAK DILAKSANAKANNYA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI SYARAT BAGI PENGUSAHA MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Agus Yulianto, S.H., M.H

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi bahwa banyak pembangunan yang semakin berkembang yang tidak disertai dengan pengurusan izin yang memadai. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan penerapan sanksi administratif dan kendala serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang terkait sanksi administratif tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai syarat bagi pengusaha mendapatkan izin mendirikan bangunan di Kota Malang?, 2) Bagaimana kendala dalam penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai syarat bagi pengusaha mendapatkan izin mendirikan bangunan di Kota Malang? dan 3) Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai syarat bagi pengusaha mendapatkan izin mendirikan bangunan di Kota Malang?

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik memperoleh data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu : 1) penerapan sanksi administratif terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan analisis dampak lalu lintas melalui teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin permanen 2) kendala dalam penerapan sanksi administrasi adalah kendala ekstern yaitu pengusaha telah memperoleh izin terlebih dahulu dan kendala intern yaitu kurangnya koordinasi antara Dinas

Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. 3)Upaya yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi dan pembaruan peraturan daerah mengenai analisis dampak lalu lintas.

Kesimpulan dan saran yang diberikan penulis terhadap permasalahan diatas adalah penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas yaitu memberikan teguran tertulis hingga pencabutan izin. Saran yang diberikan terhadap segala kendala tersebut adalah seharusnya peranan dinas perhubungan, kepolisian serta dinas lingkungan hidup harus lebih aktif untuk mendukung pelaksanaan analisis dampak lalu lintas yang dilakukan oleh pengusaha dan/atau pengembang.

RINGKASAN

Fernanda Kharisma, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2017, PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TIDAK DILAKSANAKANNYA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI SYARAT BAGI PENGUSAHA MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Agus Yulianto, S.H., M.H

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi bahwa banyak pembangunan yang semakin berkembang yang tidak disertai dengan pengurusan izin yang memadai. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan penerapan sanksi administratif dan kendala serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang terkait sanksi administratif tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai syarat bagi pengusaha mendapatkan izin mendirikan bangunan di Kota Malang?, 2) Bagaimana kendala dalam penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai syarat bagi pengusaha mendapatkan izin mendirikan bangunan di Kota Malang? dan 3) Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai syarat bagi pengusaha mendapatkan izin mendirikan bangunan di Kota Malang?

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik memperoleh data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu : 1) penerapan sanksi administratif terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan analisis dampak lalu lintas melalui teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin permanen 2) kendala dalam penerapan sanksi administrasi adalah kendala ekstern yaitu pengusaha telah memperoleh izin terlebih dahulu dan kendala intern yaitu kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. 3) Upaya yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi dan pembaruan peraturan daerah mengenai analisis dampak lalu lintas.

Kesimpulan dan saran yang diberikan penulis terhadap permasalahan diatas adalah penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas yaitu memberikan teguran tertulis hingga pencabutan izin. Saran yang diberikan terhadap segala kendala tersebut adalah seharusnya peranan dinas perhubungan, kepolisian serta dinas lingkungan hidup harus lebih aktif untuk mendukung pelaksanaan analisis dampak lalu lintas yang dilakukan oleh pengusaha dan/atau pengembang

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TIDAK
DILAKSANAKANNYA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI
SYARAT PENGUSAHA MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Fernanda Kharisma, LutfiEffendy, S.H., M.Hum, AgusYulianto, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email:

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi administratif sebagai akibat tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai syarat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.

Dalam aspek penelitian tersebut,

pembahasan ditekankan terhadap bagaimana bentuk sanksi administratif yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang terhadap pengusaha yang tidak memiliki dan/atau mengurus analisis dampak lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

Kata Kunci: sanksi, administratif, analisis.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TIDAK DILAKSANAKANNYA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI SYARAT PENGUSAHA MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi di Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Fernanda Kharisma Editya**
b. Nim : **135010109111008**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka waktu penelitian : **1,5 Tahun**

Disetujui pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 196008101986011002

Agus Yulianto, S.H., M.H
NIK. 195907171986011001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TIDAK
DILAKSANAKANNYA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI
SYARAT PENGUSAHA UNTUK MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (STUDI DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA
MALANG).**

**Oleh :
Fernanda Kharisma Editya
135010109111008**

Skripsi ini telah disahkan pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 196008101986011002

Agus Yulianto, S.H., M.H
NIK. 195907171986011001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 196008101986011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TIDAK DILAKSANAKANNYA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI SYARAT PENGUSAHA MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MALANG)”**.

Pada penyusunan Skripsi ini tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan juga berkat bimbingan dan dorongan dari pihak-pihak yang telah membantu, baik secara materi maupun non materi. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung kepada yang terhormat:

1. Bapak Lutfi Effendi S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Agus Yulianto S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ayahanda Yohanes Edi Winardi dan Ibunda tercinta Ribka Erni Irawati yang telah memberikan doa, nasehat, kasih sayang dan kesabarannya dalam membesarkan dan mendidik penulis.
4. Reza Yonathan Editya dan Aurellsya Jessica Putri Editya sebagai adik dan yang selalu jadi penyemangat.
5. Andriana Agastyaningrum S.Kom sebagai calon istri yang selalu mendukung, membantu, memberikan semangat, dan meluangkan waktu serta nasehatnya setiap saat.
6. Kepada Ibu Suci Kepala Bagian Umum Dinas Perizinan Kota Malang yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
7. Kepada Ibu Indhira DInas Perizinan Kota Malang yang telah membantu mencari data.
8. Kepada mas Haru FH UB yang banyak memberikan kritik dan saran.
9. Teman – teman Fakultas Hukum / SAP angkatan 2013 yang telah memberikan masukan dan inspirasi kepada penulis selama menempuh studi dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak, sekali lagi saya ucapkan terimakasih.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai makna regenerasi bangsa untuk mencapai suatu keberhasilan khususnya untuk penulis sendiri.

Malang, 22 Februari 2018

Penulis

Fernanda Kharisma Editya

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.....	13
B. Kajian Umum Tentang Izin Mendirikan Bangunan.....	20
C. Kajian Umum Sanksi Administratif.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	28
D. Jenis Data	29
E. Sumber Data.....	30
F. Teknik Memperoleh Data	30
G. Responden dan Teknik Pengambilan Sampel.....	31

H. Teknik Analisis Data.....	31
I. Definisi Operasional.....	32

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang.....	33
B. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Tidak Dilaksanakannya Analisis Dampak Lalu Lintas Sebagai Syarat Bagi Pengusaha Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Malang.....	41
C. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Tidak Dilaksanakannya Analisis Dampak Lalu Lintas Sebagai Syarat Bagi Pengusaha Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Malang.....	51
D. Upaya Dinas Pelayanan dan Perizinan Terpadu dalam Mengatasi Kendala Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Tidak Dilaksanakannya Analisis Dampak Lalu Lintas Sebagai Syarat Bagi Pengusaha Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Malang.....	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu.....	39
--	----

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Orisinalitas Penelitian	6
TABEL 2	Daftar Pengusaha Yang tidak Melakukan Andalalin	44

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TIDAK
DILAKSANAKANNYA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI
SYARAT BAGI PENGUSAHA MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (Studi di Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang)**

Fernanda Kharisma Editya

**Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Agus Yulianto, S.H., M.H
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Email : Fernandaeditya4@gmail.com**

RINGKASAN

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi bahwa banyak pembangunan yang semakin berkembang yang tidak disertai dengan pengurusan izin yang memadai. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan penerapan sanksi administratif dan kendala serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang terkait sanksi administratif tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu :

1) Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai syarat bagi pengusaha mendapatkan izin mendirikan bangunan di Kota Malang?,2) Bagaimana kendala dalam penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai syarat bagi pengusaha mendapatkan izin mendirikan bangunan di Kota Malang? dan 3) Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai syarat bagi pengusaha mendapatkan izin mendirikan bangunan di Kota Malang?

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik memperoleh data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu : 1) penerapan sanksi administartif terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan analisis dampak lalu lintas melalui teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin permanen 2) kendala dalam penerapan sanksi administrasi adalah kendala ekstern yaitu pengusaha telah memperoleh izin terlebih dahulu dan kendala intern yaitu

kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. 3)Upaya yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi dan pembaruan peraturan daerah mengenai analisis dampak lalu lintas.

Kesimpulan dan saran yang diberikan penulis terhadap permasalahan diatas adalah penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas yaitu memberikan teguran tertulis hingga pencabutan izin. Saran yang diberikan terhadap segala kendala tersebut adalah seharusnya peranan dinas perhubungan, kepolisian serta dinas lingkungan hidup harus lebih aktif untuk mendukung pelaksanaan analisis dampak lalu lintas yang dilakukan oleh pengusaha dan/atau pengembang.

Kata kunci : Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Tidak Dilaksanakannya Analisis Dampak Lalu Lintas Sebagai Syarat Bagi Pengusaha Mendirikan Bangunan

**IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS TO EXEMPLARY
TRAFFIC IMPACT AS A REQUIREMENT FOR ENTREPRENEURS
TO ESTABLISH BUILDING PERMITS
(Study in Integrated Service and Licensing Agency of Malang)**

Fernanda Kharisma Editya

**Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Agus Yulianto, S.H., M.H
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
Email : Fernandaeditya4@gmail.com**

SUMMARY

In this thesis, the author brought up the problem regarding to the implementation of administrative sanctions against the non-implementation of traffic impact analysis. The topic was selected because there is a lot of growing construction which is not accompanied by proper permit arrangement. This thesis aims in describing, analyzing and finding the implementation of administrative sanctions and the problems with any efforts undertaken by the Integrated Service and Licensing Agency of Malang related to the administrative sanctions.

Based on the problems, the author defines the problem sources, which are: 1) How to implements the administrative sanctions against non implemented traffic impact analysis as a requirement for entrepreneurs to obtain building permit in Malang, 2) What are the problems in the implementation of administrative sanctions against non implemented traffic impact analysis as a requirement for entrepreneurs to obtain building permit in Malang? and 3) How are the efforts to overcome the problems in applying administrative sanction to the non-implemented of traffic impact analysis as a requirement for entrepreneurs to obtain building permit in Malang?

The paper used empirical juridical research method with sociological juridical approach and the techniques used to obtain data is interviews and literature study. Then, using descriptive analysis for data analysis technique.

For the results, the problem solutions are: 1) The implementation of administrative sanctions against the entrepreneurs who do not carry out the traffic impact analysis through written warning, temporary and permanent permit revocation 2) the problems of implementating the administrative sanction are external problem which is entrepreneur has already obtained permission and the internal problem which is lack of coordination between Department of Communication and Environmental Agency. 3) The efforts to overcome the problems are improving the coordination system and reforming local regulatory on traffic impact analysis.

The conclusion given by the author in implementing administrative sanction to the non-implemented traffic impact analysis is giving written warning to revocation of permit. The suggestion given to all such problems is that the role of the Department of Communication, police and environmental agency should be more active in supporting of the implementation of traffic impact analysis which is conducted by the entrepreneurs and / or developers.

Keywords :Implementaton of Administrative Sanctions To Exemplary Traffic Impact As A Requirement For Entrepreneur To Estabilish Building Permits.